

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Siska Vadila¹, Taufeni Taufik², Yesi Herawati^{3*}

^{1,2,3}Universitas Riau, Indonesia

siska.vadila@student.unri.ac.id, taufeni.taufik@lecturer.unri.ac.id,

yesiherawatiyesi@lecturer.unri.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 20 Februari 2026

Disetujui : 10 Maret 2026

Dipublikasi : 1 April 2026

ABSTRACT

The quality of local government financial reports reflects the accountability of public financial management. However, the quality of financial reporting in Indonesia is still not optimal, as indicated by the Local Financial Management Index (IPKD) and audit findings issued by the Supreme Audit Agency (BPK), especially in Rokan Hilir Regency. This condition shows the need to identify key factors that affect the quality of local government financial reports. This study aims to test and prove the influence of human resource competence, internal control systems, follow-up on BPK audit results, and the utilization of information technology on the quality of financial reports. This study uses a quantitative approach. The population in this study was all regional apparatus organizations (OPD) in Rokan Hilir Regency. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in 26 OPDs as research samples with a total of 78 respondents. The type of data used was primary data obtained through the distribution of questionnaires to respondents. The collected data was then analyzed using SmartPLS software version 4.1.1.4. The results showed that human resource competence, internal control systems, follow-up on BPK audit results, and the utilization of information technology had an effect on the quality of financial reports. This study concluded that internal organizational factors and technological support played an important role in improving the quality of local government financial reports, particularly in OPDs in Rokan Hilir Regency.

Keywords: *Audit Follow-Up; Human Resource Competence; Information Technology Utilization; Internal Control System; Public Accountability*

PENDAHULUAN

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik melalui penyajian informasi yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Meskipun penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia belum mencapai tingkat optimal. Kondisi ini tercermin dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), di mana sebagian besar provinsi dikategorikan sebagai “perlu perbaikan,” menunjukkan bahwa perbaikan dalam praktik pengelolaan keuangan dan pelaporan masih diperlukan.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Provinsi	Indeks Total	Peringkat
1	Jawa Barat	80,879	Baik
2	Banten	77,012	Perlu Perbaikan
3	Kalimantan Timur	75,599	Perlu Perbaikan
4	DKI Jakarta	74,226	Perlu Perbaikan
5	Riau	72,282	Perlu Perbaikan

6	Kalimantan Selatan	68,138	Perlu Perbaikan
7	Kalimantan Tengah	56,492	Sangat Perlu Perbaikan
8	Papua	51,637	Sangat Perlu Perbaikan
RATA-RATA			69,533
STANDAR DEVIASI			10,305

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Tabel 1 menyajikan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di beberapa provinsi di Indonesia. Nilai rata-rata indeks sebesar 69,533 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah secara umum masih berada di bawah kategori optimal. Selain itu, perbedaan nilai IPKD antar provinsi menunjukkan variasi kinerja yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pengelolaan dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah belum merata di seluruh wilayah.

Selain Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi indikator untuk menilai kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perubahan opini audit mencerminkan dinamika dalam proses pelaporan keuangan, baik berupa perbaikan maupun permasalahan yang masih memerlukan perhatian (BPK, 2022). Di Kabupaten Rokan Hilir, opini audit mengalami perkembangan dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada periode 2010-2017 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada periode 2018-2020. Namun, pada periode 2021-2023 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disertai Penekanan Suatu Hal, yang mengindikasikan permasalahan tertentu yang perlu mendapat perhatian serius agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023, masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut antara lain berupa kelebihan pembayaran belanja pegawai, ketidaksesuaian realisasi belanja modal, serta penggunaan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun opini audit telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah masih menghadapi tantangan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitasnya.

Penelitian terdahulu mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang beragam. Kuntadi *et al.*, (2022) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (Pramana *et al.*, 2023) juga menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, (Aldino *et al.*, 2022) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun demikian, hasil berbeda ditemukan oleh (Yunita *et al.*, 2024) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena empiris dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan pengembangan dari studi Salsabil Cekarani (2024) dengan melakukan modifikasi variabel, yaitu mengganti variabel pengelolaan keuangan daerah menjadi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat analisis terhadap faktor yang secara langsung berkaitan dengan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan melalui implementasi rekomendasi audit. Penelitian ini menggunakan objek pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir serta mengintegrasikan perspektif teori keagenan dan teori kepatuhan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.

Penelitian ini berfokus pada pengujian pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur akuntansi sektor publik, khususnya terkait determinan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah tingkat kabupaten. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan secara berkelanjutan.

STUDI LITERATUR

Teori Keagenan dan Teori Kepatuhan

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Masalah utama dalam hubungan keagenan (*principal-agency relationship problem*) adalah asimetri informasi yang disebabkan oleh adanya konflik kepentingan akibat masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri. Dalam konteks sektor publik, masyarakat berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah bertindak sebagai *agent* yang mengelola keuangan daerah) (Anto & Yusran, 2023). Dalam hal ini, pemerintah sering kali dianggap lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan publik. Ketimpangan informasi, terutama ketika pemerintah daerah atau pejabat memiliki akses eksklusif terhadap data keuangan, dapat membuka peluang terjadinya korupsi dan kecurangan. Untuk meminimalisir asimetri informasi tersebut, pemerintah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Ompusunggu *et al.*, 2024). Oleh karena itu, pengawasan yang efektif melalui kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci dalam meminimalkan permasalahan keagenan tersebut (Djamil & Anggraini, 2024).

Sejalan dengan teori keagenan, upaya meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi dalam pengelolaan keuangan publik juga dapat dijelaskan melalui Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Milgram (1963), yang menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan kondisi ketika individu atau organisasi mengikuti perintah atau aturan yang diberikan oleh otoritas. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh tekanan hukum, sanksi, pertimbangan etis, maupun keinginan menjaga reputasi. Dalam konteks sektor publik, kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan administratif terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional dalam mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel. Tyler (1990) menegaskan bahwa kepatuhan yang efektif tidak semata-mata didorong oleh ancaman sanksi, melainkan juga oleh kesadaran internal atas pentingnya aturan untuk mencapai tujuan bersama.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pegawai, maka semakin besar pula kemungkinan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan prinsip akuntansi dan standar pelaporan yang berlaku. Dalam perspektif teori keagenan, kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam mengurangi terjadinya asimetri informasi. Laporan keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan akuntabilitas, tetapi juga membantu menekan ketimpangan informasi (Aulia Ramadani *et al.*, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kuntadi *et al.*, 2022) dan (Irman & Salsabilla, 2022) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Vianavanka *et al.*, 2023) bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah RI No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif teori keagenan, sistem pengendalian intern berperan sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak *principal* dan *agent*. Peningkatan kualitas pengendalian internal secara konsisten akan berkontribusi pada terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih akurat dan dapat dipercaya (Orlanda *et al.*, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sari *et al.*, 2023), dan (Harahap & Erlina,

2024) menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun terdapat hasil yang berbeda menurut (Devi Yunita *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H₂: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan BPK No 2 tahun 2017 tentang pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan bahwasannya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah serangkaian tindakan konkret yang dilakukan oleh pejabat atau instansi terkait sebagai respons terhadap temuan dan rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan. Hubungan antara teori kepatuhan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terletak pada kewajiban pemerintah daerah untuk mematuhi rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pemerintah daerah dapat dilihat dari sejauh mana rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten dan berkelanjutan (Pramana *et al.*, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pramana *et al.*, 2023) dan (Kuntadi *et al.*, 2022) menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hal tersebut di bantah oleh (Mugiarty *et al.*, 2018) yang mengatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H₃: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi untuk mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan (Irman & Salsabilla, 2022). Dalam perspektif teori keagenan, pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengurangi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Penggunaan sistem digital seperti SIMDA dan *e-budgeting* membantu menyediakan data yang lebih transparan, *real-time*, dan andal sehingga meminimalkan risiko manipulasi dan ketidakakuratan laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Roreng *et al.*, 2021) dan (Harahap & Erlina, 2024) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut (Yamin *et al.*, 2025) dan (Sintia *et al.*, 2022) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H₄: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hilir yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria OPD yang menangani fungsi pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 26 OPD dengan total 78 responden, di mana masing-masing OPD diwakili oleh tiga responden.

Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan menggunakan skala likert 1-5. Model pengukuran dalam penelitian ini menggunakan model reflektif, karena indikator dipandang sebagai refleksi dari konstruk laten yang diukur. Penelitian ini melibatkan lima variabel, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) yang diukur melalui indikator pendidikan, pengetahuan, pelatihan, pengalaman, dan perilaku dengan total 10 item pernyataan; Sistem Pengendalian Intern (X2) yang diukur melalui indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal dengan total 10 item pernyataan; Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (X3) yang diukur melalui indikator tingkat penyelesaian rekomendasi, ketepatan waktu tindak lanjut, kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi, dan dampak tindak lanjut terhadap perbaikan laporan keuangan dengan total 8 item pernyataan; Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) yang diukur melalui indikator jumlah komputer yang memadai, pemanfaatan jaringan internet, proses akuntansi yang dilakukan secara komputerisasi, dan penggunaan *software*

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan total 8 item pernyataan; serta Kualitas Laporan Keuangan (Y) yang diukur melalui indikator relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan dengan total 10 item pernyataan.

Sebelum dilakukan analisis, data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner terlebih dahulu ditabulasi menggunakan *Microsoft Excel* sebagai alat bantu pengolahan awal. Instrumen penelitian kemudian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan indikator dalam mengukur konstruk penelitian. Evaluasi model pengukuran (outer model) dilakukan dengan menilai nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE) untuk menguji validitas konvergen, kriteria Fornell-Larcker untuk validitas diskriminan, serta *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* untuk menguji konsistensi internal konstruk. Selain itu, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk memastikan tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel independen dalam model struktural. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS* versi 4.1.1.4. Pengujian hipotesis dilakukan melalui teknik *bootstrapping* dengan memperhatikan nilai *t-statistics* dan *p-values*. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) dianalisis untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing variabel independen terhadap R^2 , digunakan f^2 (effect size). Nilai f^2 menunjukkan besarnya pengaruh relatif setiap konstruk independen terhadap konstruk dependen.

HASIL

Responden dalam penelitian ini terdiri dari bendahara pengeluaran, kepala sub bagian keuangan, dan staf keuangan yang bekerja di OPD Kabupaten Rokan Hilir. Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja (dalam tahun), dan pendidikan formal.

Tabel 2. Gambaran Umum Responden

Karakteristik Responden	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	43	55,13%
	Perempuan	35	44,87%
Total		78	100%
Latar Belakang Pendidikan	Fakultas Ekonomi	24	30,80%
	Selain Fakultas Ekonomi	44	56,40%
	Tidak Menyertakan Latar Belakang	10	12,80%
Total		78	100%
Pengalaman Kerja	1-10 tahun	72	92,30%
	11-20 tahun	4	5,10%
	21-30 tahun	2	2,60%
Total		78	100%
Pendidikan Terakhir	SLTA/SMA	10	12,80%
	Diploma	6	7,70%
	Sarjana (S1)	59	75,60%
	Magister (S2)	3	3,80%
Total		78	100%

Sumber: Data Olahan Penulis (2025)

Pengujian model pengukuran dalam penelitian ini dilakukan melalui uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Uji validitas konvergen digunakan untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu merefleksikan konstruk atau variabel laten yang diukur. Suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan konstruksya. Namun demikian, pada tahap pengembangan awal instrumen, nilai *loading factor*

antara 0,50-0,60 masih dapat ditoleransi (Hair *et al.*, 2021:77).

Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh indikator dalam penelitian ini memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Rincian nilai *loading factor* masing-masing indikator disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Loading Factor

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	X1.1	0.709	0.700	Valid
	X1.2	0.794	0.700	Valid
	X1.3	0.713	0.700	Valid
	X1.4	0.723	0.700	Valid
	X1.5	0.765	0.700	Valid
	X1.6	0.751	0.700	Valid
	X1.7	0.768	0.700	Valid
	X1.8	0.816	0.700	Valid
	X1.9	0.839	0.700	Valid
	X1.10	0.755	0.700	Valid
Sistem Pengendalian Intern	X2.1	0.739	0.700	Valid
	X2.2	0.853	0.700	Valid
	X2.3	0.774	0.700	Valid
	X2.4	0.711	0.700	Valid
	X2.5	0.733	0.700	Valid
	X2.6	0.786	0.700	Valid
	X2.7	0.723	0.700	Valid
	X2.8	0.718	0.700	Valid
	X2.9	0.840	0.700	Valid
	X2.10	0.823	0.700	Valid
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	X3.1	0.829	0.700	Valid
	X3.2	0.792	0.700	Valid
	X3.3	0.703	0.700	Valid
	X3.4	0.742	0.700	Valid
	X3.5	0.809	0.700	Valid
	X3.6	0.855	0.700	Valid
	X3.7	0.796	0.700	Valid
	X3.8	0.803	0.700	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X4.1	0.861	0.700	Valid
	X4.2	0.905	0.700	Valid
	X4.3	0.872	0.700	Valid
	X4.4	0.719	0.700	Valid
	X4.5	0.919	0.700	Valid
	X4.6	0.901	0.700	Valid
	X4.7	0.762	0.700	Valid
	X4.8	0.834	0.700	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	Y.1	0.777	0.700	Valid
	Y.2	0.861	0.700	Valid
	Y.3	0.899	0.700	Valid
	Y.4	0.891	0.700	Valid
	Y.5	0.827	0.700	Valid
	Y.6	0.777	0.700	Valid
	Y.7	0.794	0.700	Valid
	Y.8	0.836	0.700	Valid
	Y.9	0.785	0.700	Valid

	Y.10	0.780	0.700	Valid
--	------	-------	-------	-------

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.4 (2025)

Pengujian validitas konvergen tidak hanya dilihat dari nilai *outer loading*, tetapi juga melalui nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Konstruk dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen apabila nilai AVE melebihi 0,50, yang menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan varians konstruk secara memadai. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4, seluruh konstruk telah memiliki nilai AVE di atas batas yang ditetapkan sehingga dapat dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Convergen

Variabel	AVE	Rule Of Thumb	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.584	0.500	Valid
Sistem pengendalian intern	0.596	0.500	Valid
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	0.628	0.500	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.721	0.500	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	0.679	0.500	Valid

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.4 (2025)

Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk laten berbeda dengan konstruk lainnya dalam model. Pengujian dilakukan menggunakan kriteria Fornell dan Larcker, yaitu dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk. Konstruk dinyatakan memenuhi syarat apabila nilai akar AVE lebih tinggi daripada korelasi dengan konstruk lain. Berdasarkan Tabel 5, seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan sehingga dinyatakan valid. Beberapa konstruk menunjukkan nilai korelasi negatif, seperti hubungan antara tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan kompetensi sumber daya manusia. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak searah, namun masih dapat diterima dalam analisis PLS-SEM serta tidak mempengaruhi validitas diskriminan model.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Diskriminan

	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Sistem pengendalian intern	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kualitas Laporan Keuangan
X1	0.764				
X2	0.386	0.772			
X3	-0.043	-0.147	0.792		
X4	-0.003	0.073	0.185	0.849	
Y	0.459	0.342	0.262	0.301	0.824

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.4 (2025)

Setelah pengujian validitas diskriminan, tahap berikutnya adalah uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi internal masing-masing konstruk. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila kedua nilai tersebut melebihi batas 0,70 (Sihombing & Arsani, 2024:3). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria tersebut, sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho c)</i>	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0.921	0.933	Reliabel
Sistem pengendalian intern (X2)	0.924	0.936	Reliabel
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (X3)	0.918	0.931	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	0.944	0.954	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.947	0.955	Reliabel

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.4 (2025)

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 7, seluruh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) berada di bawah batas yang direkomendasikan yaitu <5, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian (Hair *et al.*, 2021:93).

Tabel 7. Uji Multikoleniaritas

	VIF
X1 -> Y	1.177
X2 -> Y	1.213
X3 -> Y	1.064
X4 -> Y	1.048

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.4 (2025)

Pengujian model struktural dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) sebagai indikator kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 pada penelitian ini disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai R^2

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.393	0.360

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.4 (2025)

Berdasarkan Tabel 8, nilai *R-Square* untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,393 yang menunjukkan bahwa 39,3% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh empat variabel independen, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sisanya, sekitar 60,7% variasi dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai *R-Square* ini termasuk dalam kategori *moderate* karena berada pada rentang 0,33-0,67 (Sihombing & Arsani, 2024:4). Secara praktis, hasil ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model yang juga berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan, dilakukan analisis *effect size* (f^2), yang menunjukkan besarnya pengaruh relatif setiap faktor terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Nilai F^2

	Y
X1	0.212
X2	0.062
X3	0.110
X4	0.089

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.4 (2025)

Berdasarkan Tabel 9, nilai *effect size* (f^2) kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh sedang terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, sistem pengendalian intern, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan pengaruh kecil terhadap kualitas laporan keuangan (Hair *et al.*, 2021:162). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan dengan variabel lainnya.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menilai pengaruh antar konstruk dalam model struktural. Analisis menggunakan metode PLS-SEM dengan melihat nilai koefisien jalur (*path coefficient*) sebagai indikator arah dan kekuatan hubungan. Signifikansi pengaruh diuji melalui prosedur *bootstrapping* dengan memperhatikan nilai *t-statistic* dan *p-value*. Pada tingkat signifikansi 5%, hipotesis dinyatakan diterima apabila *p-value* < 0,05 dan *t-statistic* > 1,96 (Hair *et al.*, 2021:94).

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Sampel Asli (O)	Rata-Rata Sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik	P values	Keterangan
X1 -> Y	0.389	0.393	0.086	4.502	0.000	Diterima
X2 -> Y	0.214	0.225	0.095	2.254	0.024	Diterima
X3 -> Y	0.266	0.286	0.096	2.770	0.006	Diterima
X4 -> Y	0.238	0.243	0.089	2.674	0.008	Diterima

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.4 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H1 dinyatakan diterima. Temuan ini menegaskan bahwa pegawai yang memiliki kompetensi tinggi mampu menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi serta standar pelaporan pemerintah. Kompetensi yang memadai memungkinkan pegawai melakukan pencatatan transaksi dengan akurat, menerapkan prinsip akuntansi secara tepat, dan menyajikan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pada OPD Kabupaten Rokan Hilir. Secara teoritis, hasil ini mendukung teori keagenan yang menegaskan bahwa instansi pemerintah, khususnya OPD Kabupaten Rokan Hilir, bertindak sebagai *agent* yang berkewajiban menyajikan laporan keuangan berkualitas kepada *principal*, yaitu masyarakat. Dengan kata lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia bukan hanya meningkatkan ketepatan teknis penyusunan laporan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kuntadi *et al.*, 2022) dan (Irman & Salsabilla, 2022) dan yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H2 dinyatakan diterima. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengendalian intern sangat menentukan kualitas laporan yang dihasilkan. Sistem pengendalian intern yang memadai mendorong pemisahan tugas yang jelas, prosedur otorisasi yang tertib, pencatatan transaksi yang akurat, serta pengawasan yang berkelanjutan, sehingga informasi keuangan yang disajikan menjadi andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara teoritis, hasil ini mendukung teori keagenan yang menegaskan bahwa instansi pemerintah sebagai *agent* memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan yang berkualitas kepada *principal*, yaitu masyarakat. Sistem pengendalian intern berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang

dapat meminimalkan asimetri informasi dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan OPD Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Sari *et al.*, 2023), dan (Harahap & Erlina, 2024) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H3 dinyatakan diterima. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit meningkatkan keandalan dan akuntabilitas laporan keuangan OPD Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan seperti pengembalian kelebihan pembayaran, perbaikan prosedur akuntansi, dan penertiban administrasi memberikan kontribusi langsung terhadap penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara teoritis, temuan ini selaras dengan teori kepatuhan, yang menekankan bahwa entitas pemerintah berkewajiban menaati regulasi serta menindaklanjuti rekomendasi auditor sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Tindak lanjut yang konsisten tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memperbaiki kelemahan sistem, tetapi juga mencerminkan budaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan (Pramana *et al.*, 2023) dan (Kuntadi *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H4 dinyatakan diterima. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi langsung pada penyusunan laporan keuangan yang akurat, cepat, dan terintegrasi di OPD Kabupaten Rokan Hilir. Pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup ketersediaan infrastruktur, jaringan internet, serta aplikasi akuntansi terkomputerisasi mendukung pencatatan dan pelaporan yang *real-time*, meminimalkan kesalahan input data, dan memperkuat kontrol internal. Secara teoritis, temuan ini selaras dengan teori keagenan yang menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Optimalisasi sistem digital seperti pelaporan berbasis aplikasi dan pengelolaan anggaran terkomputerisasi, membantu memperkuat akuntabilitas serta meminimalkan risiko manipulasi data. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Harahap & Erlina, 2024) dan (Roreng *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur, efektivitas pengendalian intern, kepatuhan terhadap rekomendasi BPK, serta optimalisasi teknologi informasi menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Secara teoretis, temuan ini mendukung teori keagenan dan teori kepatuhan yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan publik. Secara praktis, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi pegawai, sistem pengendalian, penyelesaian tindak lanjut audit, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian hanya dilakukan pada OPD Kabupaten Rokan Hilir sehingga hasilnya belum tentu mencerminkan kondisi pemerintah daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, data yang digunakan bersumber dari kuesioner sehingga masih bergantung pada persepsi responden. Nilai *R-Square* sebesar 0,393 juga menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar

model penelitian yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, menggunakan pendekatan metode yang lebih beragam, serta menambahkan variabel lain yang relevan agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Aldino, H. P., Annisa, & Zulvia, D. (2022). Pengaruh standar akuntansi pemerintah, internal audit, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah daerah Kota Padang. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(2), 116-126. <https://doi.org/10.31869/me.v8i2.3606>
- Anto, L. O., & Yusran, I. N. (2023). Determinants of the quality of financial reports. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1331>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. (2023, March 13). Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah unaudited tahun anggaran 2022 dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir [Siaran pers]. <https://riau.bpk.go.id/lagi-bpk-riau-menerima-lkpd-unaudited-ta-2022-dari-empat-pemda/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK*.
- Djamil, N., & Anggraini, M. (2024). Suppressing the level of corruption in Kampar District: A study of the impact of accountability, audit opinions, publication of financial statements, audit results and follow-up of audit results. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10538909>
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer.
- Harahap, A. J. S., & Erlina. (2024). Factors improving the quality of local government financial reporting performance: A mini review approach. *West Science Business and Management*, 2(3), 1038-1044. <https://doi.org/10.58812/wsbm.v2i03.1292>
- Irman, M., & Salsabilla, L. (2022). Faktor pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada OPD Pemerintah Kota Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Bisnis, Syariah dan Teknologi*, 1(1), 82-98. <https://doi.org/10.62833/embistek.v1i1.13>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. (2023). *Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) tahun 2023*. <https://ipkd.kemendagri.go.id>
- Kuntadi, C., Erika, J., Saragi, M., Syafira, S. I., & Penulis, K. (2022). Pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(5). <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i5>
- Mugiarty, L., Ritchi, H., & Pratama, A. (2018). Pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang milik negara (survey pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 261-274. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i2.1089>
- Nadya Vianavanka, J., Kurniawan, A., & Hardiana, R. D. (2023). Pengaruh tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan efektivitas sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 2(2), 120-131. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/view/61857>
- Ompusunggu, T., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2024). Analysis of factors affecting local government's financial losses in North Sulawesi. *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(2), 226-240. <https://doi.org/10.58784/cfabr.204>
- Orlanda, H., Gowon, M., & Erwati, M. (2021). Pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah, sistem pengendalian intern, dan kualitas sumber daya manusia terhadap

- kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada dinas-dinas di Provinsi Jambi). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(2), 165-183. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i2.13554>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah*.
- Pramana, A. C., Rukmini, M., Riningsih, D., Prihardina, O. W., & So, M. (2023). Tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan sebagai penunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *JAF - Journal of Accounting and Finance*, 7(1), 49. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5936>
- Ramadani, P. A., Taufik, T., & Nurulita, S. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, 4(2), 265-278. <https://doi.org/10.56870/g0ye1k72>
- Roreng, P. P., Bandhaso, M., & Tandirerung, C. J. (2021). Competency analysis of human resources and the use of information technology on the quality of financial reports in the local government of the City of Makassar. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1218-1222. <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.113>
- Sihombing, P. R., & Marsani, A. M. (2024). *Aplikasi SmartPLS 4.0 untuk statistika pemula*. Minhaj Pustaka ID.
- Sintia, D., Maria, M., & Armaini, R. (2022). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten OKI. *JAF - Journal of Accounting and Finance*, 6(2), 107. <https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5198>
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.
- Yunita, S. D., Yanti, S., Novianty, N., & Analisa. (2024). Pengaruh penerapan pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin. *AkMen: Jurnal Ilmiah*, 21(3), 268-280. <https://doi.org/10.37476/akmen.v21i3.4878>